

KEPUTUSAN PEMERINTAH SUDAN SELATAN DI ERA PRESIDEN SALVA KIIR UNTUK BERGABUNG DENGAN *WORLD BANK GROUP* PADA TAHUN 2012

Hesti Puspitasari,

Email: hestipvs@gmail.com

Surwandono,

Email: surwandono@umy.ac.id

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Keputusan Pemerintah Sudan Selatan di Era Presiden Salva Kiir untuk Bergabung dengan *World Bank Group* pada Tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Sudan Selatan bergabung dengan *World Bank Group*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis telah menemukan fakta bahwa keputusan Pemerintah Sudan Selatan untuk bergabung dengan *World Bank Group* karena adanya adanya Citra positif *World Bank Group* dalam pandangan Pemerintah Sudan Selatan yang didasari atas sikap pragmatisme.

Kata Kunci: Pemerintah, Sudan Selatan, World Bank Group, Organisasi Internasional

ABSTRACT

This research discusses about South Sudan's Government Decision in President Salva Kiir Era to Join the World Bank Group in 2012. The purpose of this research is to analyze and find out the factors underlying South Sudan joining the World Bank Group. Based on the research that has been done, the research conducted by the Government of South Sudan to join the World Bank Group is due to a decrease in economic and political capacity in South Sudan, as well as a positive image of the World Bank Group in the view of the Government of South Sudan based on pragmatism.

Keywords: Government, South Sudan, World Bank Group, International Organization

PENDAHULUAN

Republik Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia dengan Ibu kota di Juba. Terletak di bagian Afrika Timur, Sudan Selatan dikurung oleh daratan yang berbatasan langsung dengan Ethiopia di sebelah timur, Kenya, Uganda dan Republik Kongo di sebelah selatan, Republik Afrika Tengah disebelah barat dan Sudan di sebelah utara. Negara ini menjadi negara ke-55 di Benua Afrika yang resmi berdiri tanggal 9 Juli 2011. Sebelumnya,

Sudan Selatan merupakan bagian dari negara Sudan, hingga terjadi konflik internal yang berkepanjangan dan Sudan Selatan memilih untuk berdiri sendiri. (World Bank, 2016).

Konflik yang terjadi di Sudan disebabkan oleh perselisihan yang antara dua etnis, yaitu etnis Arab dan Afrika. Dua etnis tersebut merupakan etnis terbesar yang ada di Afrika, akan tetapi disebutkan bahwa etnis Arab lebih mendominasi dinamika Sudan yang mengakibatkan banyak kebijakan yang dibuat yang lebih memihak etnis Arab. Seperti misalnya, etnis Arab bermukim di bagian utara yang memiliki tingkat kesuburan lebih baik daripada wilayah selatan yang dimukimi oleh etnis Afrika, kemudian pendapatan minyak yang asalnya dari wilayah selatan justru digunakan untuk membangun wilayah utara. Karena hal tersebut, etnis Afrika merasa diperlakukan tidak adil hingga mengakibatkan perang saudara (Cahyanti, 2017).

Karena perselisihan antara dua etnis tersebut, timbul perang saudara yang terjadi ketika etnis Afrika yaitu suku Anya-Nya yang bermukim di bagian selatan Sudan dan menganut keyakinan Kristen Animisme melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Sudan pada tahun 1956 yang kemudian berakhir dengan ditandatanganinya Addis Ababa Agreement pada tahun 1972, perjanjian tersebut berisi tentang pembagian daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Meskipun sudah ada perjanjian, kelompok pemberontak muncul kembali di wilayah tepi barat Sudan yaitu Darfur dan dikenal dengan sebutan *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang dan *Justice and Equality Movement* (JEM). Kelompok ini menuntut adanya keadilan dari pemerintah baik dalam segi pembuatan kebijakan dan pembagian sumber daya. Di sisi lain Pemerintah Sudan sudah membentuk pasukan Janjaweed yang terdiri dari suku Arab Rizeigat, Misseriya, dan Abbala untuk melawan SPLA dan JEM. Dimana pasukan Janjaweed ini sebelumnya sudah dijanjikan tanah oleh Pemerintah Sudan. Pada tahun 2003, Presiden Chad, Idriss Deby menjadi mediator atas konflik tersebut namun gagal. Selanjutnya tahun 2004 kelompok SPLA meminta bantuan kepada Uni Afrika untuk menjadi mediator dan membahas masalah gencatan senjata. (Cahyanti, 2017) Tahun 2005 menandatangani perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang berisi tentang kesempatan Sudan Selatan untuk merdeka. Konflik masih terus berlangsung hingga akhirnya Sudan Selatan memutuskan untuk memisahkan diri dari Sudan secara damai melalui referendum. (Blanchard, 2013).

Sebelumnya mencapai kemerdekaan, John Garang selaku pemimpin daerah otonom Selatan menginginkan bersatu dengan utara dan menggunakan sosialisme sebagai pemecah masalah ekonomi yang sedang hancur akibat konflik. Keterbelakangan ekonomi yang selama ini terjadi di wilayah selatan Sudan merupakan hasil dari kebijakan dan praktik kolonialisme yang diperparah lagi oleh tindakan rezim neo-kolonialisme serta konflik yang tak kunjung reda. Hingga Sudan bagian selatan memisahkan diri dengan Sudan dan merdeka dengan membawa prinsip sosialisme masih melekat. Penerapan sosialisme untuk masalah yang dihadapi penduduk Sudan bagian selatan sebenarnya bukan hal yang baru lagi, akan tetapi solusi yang pernah ditawarkan untuk menuju pembangunan yang lebih baik. Mereka yang percaya terhadap komunisme atau sosialisme juga berpendapat bahwa masalah utama yang dihadapi penduduk Sudan bagian selatan adalah pembangunan yang tidak merata. (Moro, Santschi, Gordon, & dkk, 2017). Sedangkan Salva Kiir menginginkan hal yang sebaliknya, dia percaya

bahwa dengan menjadi negara independent dan mengadopsi sistem-sistem pemerintahan yang baru akan mampu membawa Sudan Selatan kearah yang lebih baik.

Sudan Selatan resmi merdeka dan menjadi negara independent, dengan membawa Salva Kiir menjadi presiden pertama. Dalam situasi kemerdekaan konflik internal masih berlanjut. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketegangan antara Juba dan Khartoum mengenai pembagian minyak dan perbatasan. (Deng, 2011) Situasi Sudan Selatan menjadi semakin kompleks ketika negara ini harus fokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian melakukan reformasi terhadap institusi lama yang sudah ada untuk menciptakan lembaga-lembaga yang baru seperti lembaga ekonomi. Dengan demikian, Sudan Selatan memiliki peluang untuk lepas dari sistem ekonomi yang lama dan bisa membentuk sendiri sistem ekonomi baru yang sesuai dengan kondisi negaranya. Memperkuat lembaga yang sudah ada juga akan menjadi prioritas untuk memperbaiki sistem pemerintahan demokrasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Sudan Selatan dalam waktu dekat. (Toh & Kasturi, 2012).

Setelah satu tahun merdeka, Sudan Selatan memutuskan untuk bergabung dengan *World Bank Group* dan menjadi negara anggota yang ke-188. Negara Sudan Selatan menjadi anggota terbaru *World Bank Group* setelah menandatangani perjanjian dan konvensi dengan *World Bank Group* di Washington D.C. (The World Bank Group, 2012). Tujuan daripada *World Bank Group* yaitu berfokus pada mengakhiri kemiskinan ekstrim dan mempromosikan kesejahteraan bagi negara anggotanya terutama negara-negara dunia ketiga. *World Bank Group* juga berkomitmen untuk membantu setiap negara anggota dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan cara memberi layanan dan bantuan keuangan. Disamping itu, *World Bank Group* akan memperluas dan memperkuat kerjasamanya dalam sektor swasta dengan negara-negara yang membutuhkan. Untuk mengatasi tantangan pembangunan di negara terbelakang, *World Bank Group* akan memanfaatkan lembaga-lembaga negara yang ada didalamnya. (World Bank Group, 2013).

Sudan Selatan sebagai negara yang memiliki pengaruh sosialisme, dimana ideologi tersebut sangat bertentangan dengan ideologi liberalisme yang dianut oleh kaum barat, menjadi kejanggalan tersendiri mengapa Pemerintah memutuskan untuk bergabung dengan *World Bank Group*. Seperti yang kita tahu bahwa sosialisme merupakan ideologi yang memiliki ciri khas tersendiri. Sosialisme menganggap bahwa dalam sistem ekonomi, sifat kepemilikan bersama merupakan sifat yang baik. Hak kepemilikan pribadi justru akan dianggap merusak sifat baik manusia, dimana manusia bisa menjadi egois dan serakah. (Wikandaru & Cahyo, 2016) Sedangkan kaum liberal kapitalis beranggapan bahwa hak kepemilikan individu merupakan bentuk yang terbaik, pasalnya manusia dipercaya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atau kepentingannya masing-masing. (Suhelmi, 2007)

Prinsip Sudan Selatan yang memilih untuk menerapkan sosialisme demi mencapai tujuan negaranya, sangat bertolak belakang dengan prinsip yang diterapkan oleh *World Bank Group*. Sebagai negara yang memiliki pengaruh sosialisme, Sudan Selatan mengelola perekonomiannya dengan cara memusatkan seluruh kegiatan perekonomian di negaranya, demi kepentingan dan kemakmuran masyarakatnya. Negara ini sangat menunjung tinggi kesetaraan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Sedangkan World Bank yang

memiliki ideologi liberal kapitalis, dimana semua kegiatan perekonomian suatu negara tidak boleh ada campur tangan pemerintah, dan hak kepemilikan individu itu berlaku. Maka, jika suatu negara ingin bergabung dengan *World Bank Group* juga harus mengikuti prinsip yang dianut, bahkan negara harus melakukan privatisasi suatu perusahaan sebagai syarat masuk anggota *World Bank Group*. Dengan demikian, apabila Sudan Selatan memutuskan untuk bergabung dengan *World Bank Group* maka harus melakukan privatisasi salah satu perusahaan milik negara, dan apabila Sudan Selatan melakukan hal tersebut maka prinsip yang diterapkan untuk mensejahterakan masyarakatnya akan hangus. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar mengapa Sudan Selatan memutuskan untuk bergabung dengan *World Bank Group*.

LANDASAN TEORI

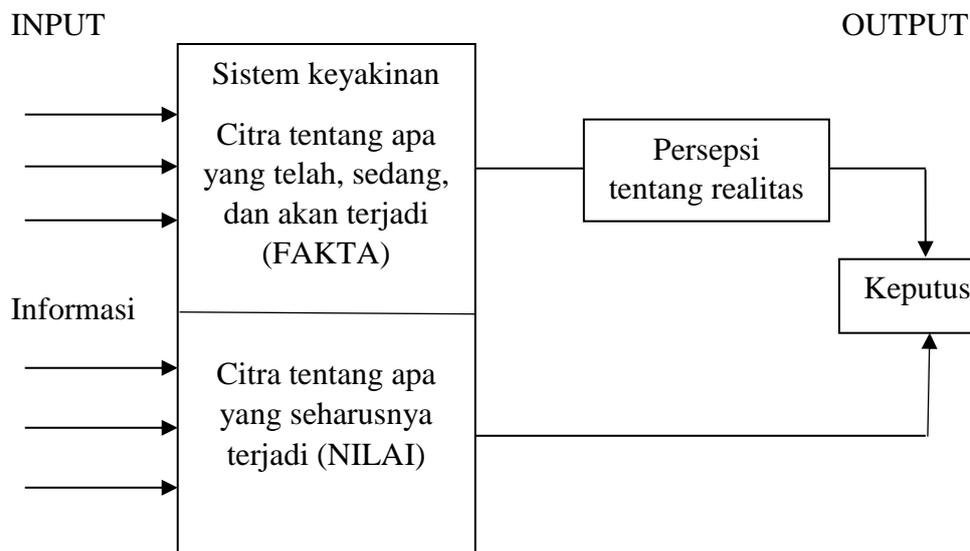
1. Teori Persepsi Ole R. Holsti

Untuk menjelaskan mengenai keputusan yang diambil oleh Pemerintah Sudan Selatan terhadap keanggotaannya dengan *World Bank Group*, penulis mencoba menggunakan Teori Persepsi yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti. Dalam teorinya, Holsti menggunakan pendekatan psikologis untuk menjelaskan bahwa *national image* yang dimiliki setiap negara dapat mempengaruhi pemimpin negara dalam mengambil keputusan. Holsti beranggapan bahwa, dalam teori persepsi terdapat tiga komponen yang berbeda, antara lain ialah nilai, keyakinan, pengetahuan (fakta) yang dimiliki oleh para *decision maker*. Menurut teori ini, persepsi dan kepercayaan pemimpin atau aktor negara dianggap sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Holsti bahwa:

“...the perception of the state leaders of the state’s relative power position may be more important than the “actual” relative power position, it may also be argued that the state leader’s perception of public opinion may be more important than what the public (as a whole) actually thinks and believes”. (Holsti, 2004).

Hal tersebut dikuatkan kembali oleh Kenneth Boulding yang berpendapat bahwa persepsi yang dimiliki oleh seorang pemimpin memainkan peran penting dalam menentukan perilaku suatu negara dalam sistem internasional. Persepsi dari seorang pemimpin negara banyak dipengaruhi oleh proses psikologis, misalkan saja untuk merasionalkan tindakan, mempertahankan pendapat, atau bahkan mengurangi kecemasan pemimpin akan hal buruk yang mungkin terjadi. (Jones, 1992) Ole R. Holsti mengemukakan bahwa sistem keyakinan sendiri terdiri dari serangkaian citra yang kemudian membentuk sebuah kerangka panduan atau sudut pandang seseorang. Citra tersebut meliputi beberapa hal seperti realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa mendatang, serta preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Hubungan antara sistem kepercayaan yang dimiliki oleh *decision maker* dengan proses pengambilan kebijakan dapat dilihat dari bagan berikut:

Bagan 1. 1. Hubungan antara system keyakinan dengan pembuatan keputusan politik luar negeri



Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai dan keyakinan seseorang dapat membantunya dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Dalam hal ini terdapat dua jenis citra, yaitu citra tertutup dan terbuka. Citra tertutup merupakan arah pandangan atau persepsi terhadap penolakan informasi denganya, serta lebih memilih beberapa bagian tertentu dari informasi tersebut untuk menutupi citra yang sudah ada. Sedangkan citra terbuka lebih mengarah kepada penerimaan terhadap semua informasi yang baru, walau mungkin bertentangan dengan citra yang telah dipegang sebelumnya (Holsti, 1962). Baik terbuka maupun tertutup, setiap orang memiliki citra yang berbeda-beda dalam mengintepretasikan informasi yang didapat. Intepretasi terhadap informasi yang didapatkan tergantung pada sistem keyakinan dan citra yang dimiliki oleh *decision maker* tersebut.

Sistem keyakinan dan citra juga dapat memunculkan sikap pragmatisme para pengambil keputusan. Karena pragmatisme adalah suatu filsafat tentang tindakan manusia. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani “pragma” yang artinya perbuatan atau tindakan. Sedangkan “isme” berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme memiliki arti yaitu paham yang menekankan bahwa pemikiran itu mempengaruhi tindakan dengan kriteria kebenaran berupa manfaat. Jadi, suatu tindakan atau pemikiran akan dianggap pragmatisme apabila membawa suatu hasil yang bermanfaat. (Stroh, 1968)

Pragmatisme menjadi sangat populer dan dipakai dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu, karena menyangkut pengalaman manusia itu sendiri. Bagi kaum pragmatis, untuk mengambil tindakan tertentu ada dua hal penting. Pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Dan yang kedua yaitu tujuan dari tindakan itu sendiri. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia pasti memiliki ide atau keyakinan yang ingin direalisasikan. Untuk merealisasikan ide atau tindakan tersebut maka manusia akan mengambil keputusan. (Abdullah, 2004)

Dalam konteks Sudan Selatan, Presiden Salva Kiir menggunakan citra terbuka terhadap *World Bank Group* dengan mengesampingkan fakta yang ada bahwa Sudan Selatan pernah menggunakan sosialisme. Selama dipimpin oleh John Garang, Sudan Selatan masih percaya dengan prinsip sosialisme yang akan membawa perbuahan. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Sudan Selatan ketika masih menjadi negara bagian Sudan. Disamping itu, citra positif juga terbentuk dari keterbukaan Pemerintah Sudan Selatan yang menganggap bahwa *World Bank* memiliki peran dan jasa terhadap kemerdekaan Sudan Selatan. Dengan demikian, *World Bank Group* mampu memberikan citra positif dimata Pemerintah Sudan Selatan. Peran *World Bank Group* juga masih dianggap relevan dalam mensejahterakan dan mendukung pembangunan nasional di Sudan Selatan, walaupun dengan mengesampingkan sosialisme yang pernah ada. Keefektifan bantuan *World Bank* di negara-negara Afrika sudah terbukti sejak organisasi ini terlibat langsung pada tahun 1990-an. (Ezekwesili, 2011)

Jika teori diatas diaplikasikan dalam Keputusan Pemerintah Sudan Selatan pada masa Presiden Salva Kiir, maka pandangan Holsti tentang sistem keyakinan tersebut ternyata memang dimiliki oleh Pemerintah Sudan Selatan yang diwakili oleh Presiden Salva Kiir. Sistem keyakinan yang dimiliki Presiden Salva Kiir diperoleh dari informasi yang ada. Dimana informasi yang masuk, pada akhirnya mampu membentuk sistem keyakinan Presiden Salva Kiir diantaranya ialah tidak lepas dari apa yang telah dilakukan *World Bank* untuk membantu Sudan Selatan dimasa lalu. Selain itu, peran *World Bank* di negara-negara Benua Afrika juga menambah informasi yang dapat membentuk sistem keyakinan dari Presiden Salva Kiir.

Keterbukaan Presiden Salva Kiir terhadap *World Bank* merupakan bentuk dari pragmatisme. Dimana dalam mengambil keputusan, Presiden Salva Kiir memiliki keyakinan bahwa *World Bank* akan memberi dampak positif bagi masyarakat Sudan Selatan dimasa mendatang dengan melihat manfaat yang sudah diberikan dimasa lampau. Untuk merealisasikan hal tersebut maka Presiden Salva Kiir mengambil keputusan untuk bergabung dengan *World Bank Group*.

PEMBAHASAN

Pergantian Pemimpin Sudan Selatan

John Garang dilantik menjadi Wakil Presiden pertama Sudan, untuk melayani dibawah musuh bebuyutannya, yaitu Presiden Al-Bashir, pada 9 Juli 2005 dan menjadi orang selatan dan Kristen pertama yang memegang jabatan tinggi di Sudan. Tingga minggu pasca pelantikannya, John Garang tewas dalam kecelakaan helikopter ketika kembali dari perjalanan singkatnya ke Uganda. Salva Kiir kemudian menjadi Wakil Presiden pertama yang menggantikannya. Kiir merupakan orang selatan dan Kristen kedua yang memegang jabatan penting di Sudan. Salva Kiir populer dikalangan sayap militer SPLA karena kemenangannya di medan perang dan terkenal di kalangan masyarakat karena sifat pro pemisahan yang jelas. Sifat pro pemisahannya disampaikan dengan jelas kepada masyarakat selatan, "*Lebih baik menjadi warga yang bebas di negara yang independen (Sudan Selatan), daripada menjadi warga kelas kedua di negara sendiri (Sudan)*". (Sudan Face, 2011)

Perjalanan politik Presiden Salva Kiir sudah dimulai sejak perjuangan pembebasan Sudan Selatan untuk menuju kemerdekaan. Seperti pendahulunya mendiang John Garang, Salva Kiir

yang dikenal dengan topi fendra khasnya, merupakan penduduk suku Dinka. Sebelum kepergiannya, John Garang berhasil memimpin Selatan ke perjanjian damai atau CPA dengan Utara dengan gaya yang karismatik dan tidak menimbulkan perlawanan. Kiir yang menjadi tim penasihat penting Garang juga terlibat dalam tahap awal negosiasi CPA 2005 untuk mengakhiri 21 tahun perang. Setelah berhasil dalam negosiasi perjanjian damai, Kiir diangkat menjadi wakil John Garang. Pasca kepergian John Garang, Salva Kiir menjadi pengganti dan harus memimpin Selatan dengan pedoman CPA yang sudah ditandatangani John Garang sebelumnya. Banyak masyarakat yang meragukan atau pesimis dengan model kepemimpinan Salva Kiir. Mereka mengatakan bahwa dia tidak memiliki kapasitas yang sesuai seperti pendahulunya yang dipandang intelektual dan politis. (Onyango, 2011)

Salva Kiir yang dikenal karena kesederhanaannya pada saat itu, mengakui bahwa kakinya tidak cukup besar untuk masuk ke sepatu pendahulunya. Pernyataannya yang berani diperkuat diperkuat selama pemilihan terakhir tahun 2010, Salva Kiir terpilih kembali dengan 93% suara rakyat sebagai Presiden Sudan Selatan yang semi-otonom. Ini merupakan indikasi bahwa dia tidak lagi tertarik pada Sudan bersatu. Hingga kemerdekaan pada tahun 2011, Salva Kiir resmi dilantik menjadi Presiden Sudan Selatan yang sudah mengambil daerah otonomi secara total dan menjadi negara republik. (Sudan Face, 2011)

Ketika Sudan Selatan masih berada dibawah kepemimpinan John Garang, sosialisme mungkin akan diterapkan. Hal tersebut sempat dikemukakan oleh John Garang yang merupakan aktivis paling berpengaruh di Sudan Selatan pada saat itu. Argumen John Garang tentang sosialisme yang pernah disampaikan juga didukung oleh mayoritas penduduk Sudan yang percaya tentang sosialisme merupakan cara yang cukup tepat untuk memperbaiki pemerataan di Sudan Selatan. Akan tetapi tindakan yang dilakukan John Garang untuk menerapkan sosialisme di Sudan Selatan cukup ekstrim, dia akan melawan dengan menggunakan kekuatan bagi mereka yang menolak idenya dan ingin merebut kepemimpinannya. (Moro, Santschi, Gordon, & dkk, 2017).

Melihat definisi diatas, keadaan politik dalam negeri Sudan Selatan bisa dibilang kurang stabil. Pasca meninggalnya John Garang hingga mencapai kemerdekaan Sudan Selatan berada dibawah kepemimpinan Salva Kiir, dalam transisi menuju negara independent negara ini mengalami dilema perpolitikan. Sebagai negara baru Sudan Selatan harus membangun institusi pemerintahan sendiri, sedangkan paham politik yang dulu diterapkan ketika masih bergabung dengan Sudan masih melekat. Untuk merubah hal tersebut tentu tidak mudah, bahkan sistem politik yang tidak stabil bisa berdampak pada keadaan ekonomi yang ada. Maka dari itu, Sudan Selatan memiliki tantangan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan berfungsi dengan baik. Namun pada faktanya, situasi korupsi justru terjadi di Sudan Selatan. (Amdjad, 2013) Kurang berfungsinya sistem pemerintahan dan lemahnya lembaga pemerintahan menyebabkan ketidak mampuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan demikian, Sudan Selatan diprediksi akan menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintahan yang lemah. (Huyen, 2012) Hal ini kemudian menimbulkan pragmatisme Presiden Salva Kiir dalam melaksanakan pembangunan nasional.

FAKTOR YANG MELATAR BERLAKANGI PEMERINTAH SUDAN SELATAN BERGABUNG DENGAN *WORLD BANK GROUP*

Citra Positif *World Bank Group* dalam Pandangan Pemerintah Sudan Selatan

Konflik dan krisis yang dihadapi oleh Sudan Selatan membuat negara ini berpikir kembali untuk memperbaharui sosialisme yang pernah diterapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya Sudan Selatan tidak lepas dari peran World Bank dalam membantu Sudan Selatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Bergabungnya Sudan Selatan dengan *World Bank Group* menunjukkan bahwa World Bank masih dianggap relevan dan mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat Sudan Selatan. Dilihat dari komitmen dan keberhasilan World Bank yang terlibat dalam penyelesaian konflik hingga Sudan Selatan mampu keluar dari keterpurukan telah memberikan citra yang positif dimata Pemerintah Sudan Selatan dan masyarakatnya. Berangkat dari paham awalnya yang meyakini sosialisme sebagai model terbaik untuk membentuk Sudan Selatan yang lebih terarah dimasa depan, negara ini mulai menyadari bahwa peran-peran dan berabagi bantuan yang datang dari Barat ternyata mampu merubah nasib negaranya. Melalui liberalisasi perdagangan, Sudan Selatan memberanikan diri untuk menerapkan model liberal yang selama ini dipungkirinya.

Tidak hanya masyarakat Sudan Selatan yang merasakan keuntungan dari *World Bank Group*. Hampir negara-negara di Benua Afrika merasakan bahwa bantuan World Bank masih sangat dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan disana, melalui berbagai bantuan yang digelontorkan dan program-program yang dirancang seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur World Bank berusaha menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. World Bank juga telah berhasil dalam menerapkan program di negara-negara benua Afrika, seperti program Perluasan Akses Air Bersih untuk Komunitas Pedesaan di Benin, program Menyediakan Listrik dan Memperkuat Pasar Modal Lokal di Cameroon, dan program Mengaktifkan Sektor Swasta dalam Infrastruktur dan Layanan Sosial di Kenya. Semua program tersebut merupakan cerminan komitmen World Bank dalam pengentasan kemiskinan di Benua Afrika hingga tahun 2030 mendatang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pola pikir Pemerintah Sudan Selatan untuk bergabung dengan World Bank Group juga dipengaruhi oleh negara-negara sekitarnya yang membawa informasi bahwa World Bank mampu memberikan keuntungan bagi negara yang sedang melakukan pembangunan.

Sosialisme sudah diterapkan sejak Sudan Selatan masih menjadi negara bagian dari Sudan. Pada saat itu, John Garang sebagai pemimpin sekaligus aktivis Sudan bagian selatan saat itu gencar mempromosikan ideologi sosialisme yang dianggap relevan untuk diterapkan sebagai pemecah masalah ekonomi di Sudan bagian Selatan. Pasalnya, keterbelakangan ekonomi yang selama ini terjadi merupakan hasil dari kebijakan dan praktik kolonialisme yang diperparah lagi oleh tindakan rezim neo-kolonialisme. Statement John Garang tentang penerapan sosialisme untuk masalah yang dihadapi Sudan bagian selatan sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Masyarakat yang percaya terhadap komunisme atau sosialisme juga berpendapat bahwa masalah utama yang dihadapi Sudan Selatan salah satunya adalah pembangunan yang tidak merata. (Moro, Santschi, Gordon, & dkk, 2017) Hingga John Garang meninggal pada tahun

2005 akibat kecelakaan helikopter, dan pada saat itu masa depan Sudan Selatan jatuh ditangan Salva Kiir sebagai penerus John Garang.

Ditangan Salva Kiir Sudan Selatan berhasil memisahkan diri dari Sudan dan merdeka. Transformasi politik dan liberalisasi perdagangan pun terjadi di negara ini. Diawali ketika Salva Kiir mengambil sumpah jabatan pada saat terpilih menjadi presiden pada tahun 2011. Berbeda dengan pendahulunya John Garang yang sedikit menekankan paham sosialisme, Salva Kiir memilih untuk menggunakan paham liberalisme. Setelah penandatanganan konstitusi transisi dan pengambilan sumpah jabatan, Sekretariat Jendral PBB, Ban Ki Moon menyambut Sudan Selatan sebagai anggota PBB. Pada tahun yang sama juga, *World Bank Group* mulai menawarkan keanggotaan Sudan Selatan ke dalam Perjanjian Bretton Wood. Dapat diartikan bahwa, Sudan Selatan memulai sebuah proses untuk menjadi anggota dari *World Bank Group* sejak awal kemerdekaan tahun 2011 silam. *World Bank Group* menawarkan keanggotaan dan berkomitmen total kepada rakyat dan pemerintah Sudan Selatan untuk membangun pemerintahan yang damai, membangun ekonomi yang berkinerja baik, serta membangun warga negara yang berdaya.

Kemudian dalam pidatonya, Presiden Salva Kiir menyampaikan kepada warga negaranya dan para pemimpin lainnya tentang pentingnya mengelola perekonomian negara termasuk mengelola sumber daya minyak dengan baik, berinvestasi dalam segi modal manusia dan fisik (infrastruktur), serta mendiversifikasi perekonomian negara agar mampu tumbuh lebih cepat dan luas. Pandangan liberal Presiden Salva Kiir mulai terlihat ketika beliau menyampaikan bahwa: *“Today’s political kingdom that they have attained will only be worth it if matched by economic freedom”*.

Dari statement-nya tersebut, Presiden Salva Kiir menjelaskan bahwa perlu adanya sistem ekonomi yang bebas untuk mendukung pencapaian politik yang baik. Beliau berasumsi bahwa bentuk politik dunia saat ini hanya bisa dicapai apabila negara mampu mengimbangnya dengan kebebasan ekonomi. Karena menurut Salva Kiir, ekonomi dan politik merupakan komponen terpenting dari terlaksananya tujuan nasional. Oleh karena itu, Presiden Salva Kiir berkomitmen untuk memerintah dengan baik dan secara transparan dengan terus melibatkan warga negaranya serta menegakkan prinsip akuntabilitas. (Ezekwesili, 2011)

Dengan adanya pidato di atas menandakan bahwa Salva Kiir setuju dengan tawaran *World Bank Group* untuk bergabung dan siap melakukan liberalisasi dengan menerapkan sistem ekonomi yang bebas. Dari pidatonya tersebut juga dapat dilihat bahwa citra positif World Bank dalam pandangan Pemerintah Sudan Selatan sudah ada sejak awal kemerdekaan, yang kemudian Pemerintah mendorong masyarakat untuk percaya bahwa keterlibatan World Bank di Sudan Selatan selama ini memberikan dampak positif, bahkan sebelum Sudan Selatan merdeka dan resmi bergabung dengan *World Bank Group*, dan pada saat itu juga, citra positif World Bank dalam pandangan masyarakat Sudan Selatan ikut terbentuk. Presiden Salva Kiir berusaha meyakinkan masyarakatnya bahwa model perekonomian yang bebas merupakan model terbaik yang bisa diterapkan untuk mencapai pembangunan nasional.

Menurut Holsti dalam teorinya mengatakan bahwa pragmatisme dalam Pemerintahan bisa saja terjadi ketika suatu pemimpin atau *decision maker* memilik nilai dan keyakinan

terhadap informasi yang didapat untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. (Holsti, 1962) Presiden Salva Kiir dalam model kepemimpinannya memiliki pandangan atau citra terbuka terhadap *World Bank Group*, yang mana lebih mengarah kepada penerimaan terhadap semua informasi yang baru, walau mungkin bertentangan dengan citra yang telah dipegang sebelumnya. Keterbukaan Pemerintah Sudan Selatan dalam menerima informasi, menjadi faktor yang mempengaruhi Presiden Salva Kiir menjadi pragmatis. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa World Bank sendiri sudah memberikan manfaat dan bantuan kepada Sudan Selatan sejak masih menjadi negara bagian.

Melihat definisi diatas, bisa dikatakan bahwa Pemerintah Sudan Selatan telah mengalami pragmatisme. Pragmatisme yang terjadi pada pemerintahan Salva Kiir dipengaruhi oleh peran World Bank yang selama ini membawa dampak positif bagi Sudan Selatan. Secara praktiknya *World Bank Group* sudah aktif membantu pembangunan di Sudan Selatan sejak tahun 2005 sebagai administrator melalui *Multi-Donor Trust Fund for Southern Sudan (MDTF-SS)*. (The World Bank Group, 2012) *Multi-Donor Trust Fund for Southern Sudan* atau MDTF-SS merupakan lembaga perwakilan *World Bank Group* yang dibuat untuk membantu pembangunan di Sudan Selatan. Tujuan dari MDTF-SS adalah untuk membiayai segala kegiatan pembangunan di Sudan Selatan. (The World Bank, 2011) Sudan Selatan tergolong memiliki infrastruktur yang cukup baik meskipun sebelumnya terjadi sedikit kerusakan yang diakibatkan oleh perang saudara, tetapi dalam segi pendidikan dan kesehatan Sudan Selatan menjadi negara yang terburuk di dunia. Sejauh ini MDTF-SS sudah banyak berkontribusi dalam bidang pendidikan seperti mendanai pembangunan di 46 Sekolah Dasar, memberi pelatih lebih dari 1.200 guru, mendistribusikan lebih dari 3,6 juta buku kesepuluh negara bagian. Sedangkan dibidang kesehatan MDTF-SS telah menyediakan 71 fasilitas untuk rehabilitasi kesehatan dan membangun 47 unit rumah sakit yang siap melayani 100.000 pasien per tahunnya. Menjelang kemerdekaan Sudan Selatan pada bulan Juli 2011, *South Sudan Transition Trust Fund (SSTTF)* telah melimpahkan dana senilai 75 USD untuk membantu menyediakan perawatan kesehatan, infrastruktur dan lapangan kerja bagi masyarakat Sudan Selatan. World Bank telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Sudan Selatan untuk mendukung pembangunan disana. (The World Bank Group, 2012) World Bank juga akan berperan melawan korupsi dan berusaha untuk meningkatkan perekonomian Sudan Selatan.

Pinjaman investasi Sudan Selatan selama 10 tahun terakhir (dari masa penandatanganan CPA dan sejak kemerdekaan) dari *World Bank Group* secara keseluruhan terhitung sangat besar. Pinjaman tersebut tercatat senilai 538 juta USD dari World Bank dalam kontribusi donor melalui *Multi-Donor Trust Fund (MDTF)*, 75 juta USD dari *South Sudan Transition Trust Fund* dan 294,0 juta USD dalam komitmennya dengan IDA.

Disamping itu, adanya dukungan Amerika Serikat yang merupakan negara partner Sudan Selatan. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat menjadi negara pemegang saham terbesar dalam World Bank sejak berdirinya hingga saat ini. Negara ini menjadi satu-satunya pemegang saham dan hak veto atas perubahan dalam struktur World Bank. Amerika Serikat juga memainkan peran yang unik dalam mempengaruhi dan membentuk prioritas

pembangunan. Dominasi Amerika Serikat sudah terjadi sejak awal dibentuknya World Bank, karena negara ini menjadi salah satu negara pencetus berdirinya organisasi tersebut.

Dalam sejarah kemerdekaan Sudan Selatan, Amerika memiliki peran penting sebagai fasilitator, mediator maupun pencetus perdamaian. Awal mula hubungan Amerika Serikat dengan Sudan Selatan dalam upaya perdamaian konflik adalah ketika terjadi Perang Teluk. Amerika Serikat berseteru dengan Sudan, hingga mendorong Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Bill Clinton memberikan bantuannya kepada pihak pemberontak di selatan. (Jacobs, 2012) Amerika menjadi penggerak dalam perjanjian damai antara Sudan Utara dan Selatan sejak tahun 2001. Dalam perannya, Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam membantu membuat protokol yang mengantarkan konflik dua Sudan ini pada *Comprehensive Peace Agreement (CPA)*. CPA tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 sebagai peletak dasar referendum penentuan nasib masyarakat Sudan bagian selatan pada tahun 2011. Hasilnya sebagian besar masyarakat Sudan bagian selatan memilih untuk memisahkan diri. (Bureau of African Affairs, 2018).

Pragmatisme yang terjadi pada Pemerintahan Salva Kiir juga didukung oleh keberadaan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, terutama pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, Salva Kiir Bersama kelompok Kristen Sudan Selatan bernaung di kalangan ideologi Ekstrimis Washington untuk berusaha membentuk kembali keseimbangan kekuasaan di Sudan Selatan. (Peraino, 2010) Rezim Salva Kiir sudah lama menjadi rezim kesayangan Amerika Serikat sebagai negara pendonor, sehingga Amerika Serikat mendukung penuh Salva Kiir untuk mendapatkan kemerdekaan dari Sudan. Pada masa konflik, World Bank dan Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Sudan Selatan dalam jumlah yang cukup besar. Amerika Serikat telah lama memiliki kepentingan di Sudan Selatan dengan mendukung kelompok pemberontak Selatan (SPLA) dalam berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dengan adanya bantuan dari Amerika Serikat membuat Salva Kiir semakin menilai bahwa World Bank akan sangat berguna dalam membantu pembangunan nasional Sudan Selatan.

World Bank Group menjadi penyandang dana terbesar untuk masalah kesehatan dasar, Pendidikan, infrastruktur, lingkungan serta program pemerintahan dan anti korupsi di negara berkembang. Program-program World Bank mampu membantu menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan sambil memperluas peluang bagi kaum miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong stabilitas global. Amerika Serikat menempati peringkat pertama dalam hal kontribusi untuk dana perwalian *World Bank Group*. Keterlibatan awal *World Bank Group* di Sudan Selatan yaitu pada tahun 2005 ketika Sudan Selatan (*Southern Sudan*) masih menjadi negara bagian dari Sudan. Pada saat itu CPA 2005 mengamanatkan *Multi-Donor Trust Fund for Southern Sudan (MDTF-SS)* yang dikelola oleh World Bank untuk memberikan bantuan kepada Sudan Selatan. World Bank kemudian mulai membentuk program dan produk analitik yang kuat. Mereka juga menyiapkan strategi sementara untuk Sudan Selatan pada Maret 2008 yang menguraikan tentang cara World Bank mendukung CPA.

Keterlibatan *World Bank Group* dalam konflik Sudan Selatan didasari oleh berbagai alasan. Pertama, keterlibatan tersebut untuk mendukung respon krisis dan meningkatkan mata pencaharian, menahan kemunduran yang cepat dalam kondisi sosial ekonomi yang diakibatkan

oleh rentannya populasi, untuk melindungi setiap keuntungan pembangunan yang didapat sejak tahun 2005. Kedua, *World Bank Group* memiliki peran untuk mengoptimalkan intervensi sebagai pemulihan awal dan menjaga perdamaian. Ketiga, selain Suriah, Sudan Selatan merupakan Negara yang mengalami krisis kemanusiaan *spillover* terbesar di dunia dengan dampak yang berpotensi mengguncang kawasan Afrika Timur. Hal ini merupakan solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh *World Bank Group* untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan yang inklusif. (The World Bank Group, 2017).

Sebelumnya, bantuan *World Bank* di Sudan Selatan belum secara massif. Dengan berbagai bantuan yang diberikan, Pemerintah Sudan Selatan mulai merasakan manfaat *World Bank* secara praktis. Dengan demikian, pragmatisme dan citra terbuka Presiden Salva Kiir tentang *World Bank* terjadi ketika negara ini sudah merasakan keuntungan bantuan yang diberikan oleh *World Bank* dan menginginkan hal yang lebih. Sebagai negara baru Sudan Selatan belum memiliki Kerangka Kebijakan Strategis 2012 hingga seterusnya, Pemerintah Sudan Selatan mengambil keputusan untuk bergabung dengan *World Bank Group*. Oleh karena itu negara ini mulai menerapkan rezim kebijakan perdagangan internasional. Sudan Selatan mulai melakukan liberalisasi perdagangan, karena banyak masyarakatnya yang merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan liberalisasi tersebut. Para pedagang kecil hingga kelas menengah keatas mulai bisa melakukan ekspor impor dengan mudah dan terbuka arus investasi asing yang akan sangat membantu Sudan Selatan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan menjadi anggota *World Bank Group* sekaligus IDA, Sudan Selatan akan dengan mudah mendapat pinjaman dana. *World Bank Group* merupakan salah satu organisasi atau institusi internasional yang berada dibawah kendali Pemerintah Amerika Serikat yang bernegosiasi dengan negara-negara kapitalis lainnya. Kebijakan yang dibentuk *World Bank* juga harus dibawah kepemimpinnya. (Toussaint, 2014)

KESIMPULAN

Keputusan Sudan Selatan untuk bergabung dengan *World Bank Group* mungkin merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi, mengingat hampir semua negara di dunia menjadi anggota didalamnya. Akan tetapi, apabila dilihat dari sejarahnya, Sudan Selatan merupakan negara yang terbilang masih baru dan sangat muda. Resmi merdeka pada tahun 2011, Sudan Selatan menjadi negara yang paling muda di dunia. Keputusannya untuk bergabung dengan *World Bank Group* di usianya yang masih muda, yaitu satu tahun pasca merdeka atau lebih tepatnya pada tahun 2012 menjadi sebuah keberanian tersendiri. Tidak mudah bagi sebuah negara, apalagi negara baru untuk mengambil keputusan bergabung dengan salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa bergabungnya Sudan Selatan dalam keanggotaan *World Bank Group* dipengaruhi oleh sikap pragmatis Pemerintah Sudan Selatan dan didukung oleh citra positif *World Bank* serta keterbukaan masyarakat dan pemimpin Sudan Selatan terhadap *World Bank Group*.

Konflik berkepanjangan yang menimpa Sudan Selatan membuat kondisi perekonomian negara ini menjadi terperosok. Dimana pada saat itu Sudan Selatan mengalami krisis besar-besaran, mulai dari krisis ekonomi itu sendiri yang kemudian berdampak pada krisis kemanusiaan. Ditambah dengan ditutupnya produksi minyak yang merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Dengan bekal perekonomian yang buruk dan banyaknya tekanan

sosial, Sudan Selatan sebagai negara baru harus membangun negaranya demi menciptakan negara yang demokratis, membangun perdamaian dan menegakkan keadilan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Banyak kendala yang harus dihadapi Sudan Selatan untuk melakukan pembangunan nasional, seperti seperti tingkat perkembangan sosial ekonomi yang masih sangat rendah, hingga tidak ada indeks yang dapat mengukur kesenjangan tersebut. Terlebih lagi Sudan Selatan memiliki jejak sosialisme yang pernah diterapkan untuk mendukung pembangunan.

Seiring berjalannya waktu, sosialisme mulai bergeser dan Pemerintah Sudan Selatan memberanikan diri untuk melakukan liberalisasi. Hal ini diawali dengan pergantian pemimpin pasca John Garang meninggal, dimana Sudan Selatan berganti dibawah kepemimpinan Salva Kiir. Ditangan Salva Kiir, Sudan Selatan mengalami banyak perubahan. Hal ini dikarenakan sikap presidennya yang pragmatis, lebih terbuka terhadap informasi-informasi dari luar. Konflik dan krisis yang dihadapi oleh Sudan Selatan membuat negara ini berpikir kembali untuk memperbaharui sosialisme yang pernah diterapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya Sudan Selatan tidak lepas dari peran World Bank dalam membantu Sudan Selatan untuk mempersiapkan kemerdekaan.

Bergabungnya Sudan Selatan dengan *World Bank Group* menunjukkan bahwa World Bank masih dianggap relevan dan mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat Sudan Selatan. Dilihat dari komitmen dan keberhasilan World Bank yang terlibat dalam penyelesaian konflik hingga Sudan Selatan mampu keluar dari keterpurukan telah memberikan citra yang positif dimata Pemerintah Sudan Selatan dan masyarakatnya. Berangkat dari paham awalnya yang meyakini sosialime sebagai model terbaik untuk membentuk Sudan Selatan yang lebih terarah dimasa depan, negara ini mulai menyadari bahwa peran-peran dan berabagi bantuan yang datang dari Barat ternyata mampu merubah nasib negaranya. Melalui liberalisasi perdagangan, Sudan Selatan memberanikan diri untuk menerapkan model liberal yang selama ini dipungkirinya.

Menurut Holsti dalam teorinya mengatakan bahwa pragmatisme dalam Pemerintahan bisa saja terjadi ketika suatu pemimpin atau *decision maker* memiliki nilai dan keyakinan terhadap informasi yang didapat untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. (Holsti, 1962) Presiden Salva Kiir dalam model kepemimpinannya memiliki pandangan atau citra terbuka terhadap *World Bank Group*, yang mana lebih mengarah kepada penerimaan terhadap semua informasi yang baru, walau mungkin bertentangan dengan citra yang telah dipegang sebelumnya. Keterbukaan Pemerintah Sudan Selatan dalam menerima informasi, menjadi faktor yang mempengaruhi Presiden Salva Kiir menjadi pragmatis. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa World Bank sendiri sudah memberikan manfaat dan bantuan kepada Sudan Selatan sejak masih menjadi negara bagian.

Melihat definisi diatas, bisa dikatakan bahwa Pemerintah Sudan Selatan telah mengalami pragmatisme. Pragmatisme yang terjadi pada pemerintahan Salva Kiir dipengaruhi oleh peran World Bank yang selama ini membawa dampak positif bagi Sudan Selatan. Secara praktiknya *World Bank Group* sudah aktif membantu pembangunan di Sudan Selatan sejak tahun 2005 sebagai administrator melalui *Multi-Donor Trust Fund for Southern Sudan (MDTF-SS)*. Sebelumnya bantuan World Bank di Sudan Selatan belum secara massif. Dengan berbagai

bantuan yang diberikan, Pemerintah Sudan Selatan mulai merasakan manfaat World Bank secara praktis. Dengan demikian, pragmatisme dan citra terbuka Presiden Salva Kiir tentang World Bank terjadi ketika negara ini sudah merasakan keuntungan bantuan yang diberikan oleh World Bank dan menginginkan hal yang lebih. Pragmatisme yang terjadi pada Pemerintahan Salva Kiir juga didukung oleh keberadaan Amerika Serikat. Dengan adanya bantuan dari Amerika Serikat membuat Salva Kiir semakin menilai bahwa World Bank akan sangat berguna dalam membantu pembangunan nasional Sudan Selatan.

REFERENCES

- Abdullah, M. N. (2004). Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika. *E-Journal Universitas Sumatera Utara*, 2.
- Amdjad, M. (2013, Desember 27). *Merdeka*. Retrieved from [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com/khas/tingkah-pemimpin-dan-derita-rakyat-sudan-selatan-kolom-dunia.html):
<https://www.merdeka.com/khas/tingkah-pemimpin-dan-derita-rakyat-sudan-selatan-kolom-dunia.html>
- Blanchard, L. P. (2013). *The Crisis in South Sudan*. Washington D.C: Congressional Research Service.
- Bureau of African Affairs. (2018, Agustus 10). *U.S Department of State*. Retrieved from <https://www.state.gov>: <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/171718.htm>
- Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. *Journal of International Relations*, 84-85.
- Deng, J. J. (2011). *The Catastrophic Consequences of South Sudan's Civil War*. Windsor: South Sudan Nation.
- Ezekwesili, O. (2011, Juli 9). *The World Bank in Africa*. Retrieved from <http://blogs.worldbank.org>:
<http://blogs.worldbank.org/africacan/i-was-there-when-the-republic-of-south-sudan-was-born>
- Holsti, O. R. (1962). The Belief System and National Image : a study case. *Conflict Resolution Journal*, 245.
- Holsti, O. R. (2004). *Public Opinion and American Foreign Policy*. Ann Arbor: University Michigan Press.
- Huyen, A. (2012, Juli 11). *Radio Suara Vietnam-VOV Internasional*. Retrieved from vovworld.vn:
<http://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/sudan-selatan-satu-tahun-setelah-hari-kemerdekaan-95021.vov>
- Jacobs, J. (2012, Maret 13). *Think Africa Press*. Retrieved from <https://thinkafricapress.com>:
<https://thinkafricapress.com/oil-us-south-sudan-secession/>
- Jones, W. S. (1992). *Logika Hubungan Internasional*. Jakarta: Gramedia.
- Moro, L., Santschi, M., Gordon, R., & dkk. (2017). *Statebuilding and Legitimacy Experiences of South Sudan*. London: Secure Livelihoods Research Consortium.

- Onyango, O. (2011, Agustus 8). *Paanluel Wel Media*. Retrieved from <https://paanluelwel.com:https://paanluelwel.com/2011/08/08/bbc-article-profiling-salva-kiir-monday-august-26-2010-uk/>
- Peraino, K. (2010, September 24). *News Week*. Retrieved from <https://www.newsweek.com:https://www.newsweek.com/massive-us-aid-helping-south-sudan-72101>
- Stroh, G. W. (1968). *American Philosophy*. Princenton: Duven Nostrand Company, Inc.
- Sudan Face*. (2011, Maret 7). Retrieved from <https://sudanfaces.wordpress.com:https://sudanfaces.wordpress.com/2011/03/07/the-career-of-salva-kiir-mayardit/>
- Suhelmi, A. (2007). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- The World Bank*. (2011, December 25). Retrieved from <http://documents.worldbank.org:http://documents.worldbank.org/curated/en/845101468340277416/Main-report>
- The World Bank Group*. (2012, April 18). Retrieved from <web.worldbank.org:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:23173566~menuPK:2246551~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:258644,00.html>
- The World Bank Group. (2017). *Country Engagement Note for The Republic of South Sudan*. Africa Region: The World Bank Group.
- Toh, K., & Kasturi, P. (2012). FOREIGN AID IN POST-CONFLICT COUNTRIES: THE CASE OF SOUTH SUDAN. *Jornal of Third World Studies*.
- Toussaint, E. (2014, September 1). *Committee for the Abolition of Illegitimate Debt*. Retrieved from <http://www.cadtm.org:http://www.cadtm.org/Domination-of-the-United-States-on-the-World-Bank>
- Wikandaru, R., & Cahyo, B. (2016). Landasan Ontologi Sosialisme. *Jurnal Filsafat*, 123.
- World Bank*. (2016, October 20). Retrieved from www.worldbank.org:http://www.worldbank.org/en/country/southsudan/overview
- World Bank Group*. (2013). Retrieved from <openknowledge.worldbank.org:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16093>